



## Analisis Pembiayaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* oleh Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu

Johannes Guisandro<sup>1\*</sup>, Sakti Hutabarat<sup>2</sup>, Syaiful Hadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

### ARTIKEL INFO

Sejarah artikel  
Diterima 19/12/2023  
Diterima dalam bentuk revisi 29/10/2024  
Diterima dan disetujui 06/11/2024  
Tersedia online 03/12/2024  
Terbit 25/12/2024

Kata kunci  
ISPO  
Kelapa sawit  
Pekebun swadaya  
Pembiayaan  
Sertifikasi

### ABSTRAK

*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan standarisasi untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Perpres Nomor 44 Tahun 2020 mengatur setiap perusahaan dan petani swadaya di Indonesia wajib memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 2025. Peraturan Menteri Pertanian No 38 tahun 2020 pasal 53 mengatakan bahwa pekebun dapat mengajukan bantuan biaya sertifikasi ISPO. Namun hingga tahun 2023 tidak ada besaran biaya bantuan yang jelas bagi pekebun untuk mengurus sertifikasi ISPO. Kabupaten Rokan Hulu memiliki suatu Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu (PPSKS-RH) yang sudah memiliki sertifikasi ISPO pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode survei dengan jumlah sampel 32 pekebun yang sudah memiliki sertifikasi ISPO dari dua desa di Kecamatan Bangun Purba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi awal dalam mengurus sertifikasi ISPO oleh pekebun kelapa sawit swadaya. Hasil penelitian menunjukkan pelatihan yang diberikan kepada pekebun peserta ISPO sebanyak 9 jenis pelatihan, pelatihan pendamping sebanyak 18 jenis, dan pelatihan pengurus organisasi/auditor internal sebanyak 10 jenis pelatihan. Pendampingan yang diberikan ada sebanyak 33 pendampingan sesuai indikator ISPO. Rata-rata besaran biaya pelatihan sebesar Rp 1.717.703,- per pekebun peserta sertifikasi ISPO. Rata-rata besaran biaya pendampingan sebesar Rp 2.507.088,- per pekebun peserta ISPO. Rata-rata biaya sertifikasi awal sebesar Rp 535.095,- per pekebun. Total biaya sertifikasi ISPO sebesar Rp 4.759.886,- per pekebun peserta ISPO.

© 2024 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari



### ABSTRACT

*Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) is a standard for sustainable palm oil plantations in Indonesia. According to Presidential Decree Number 44 of 2020, every company and independent farmer in Indonesia is required to have ISPO certification no later than 2025. Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2020 article 53 states that smallholders can apply for assistance with ISPO certification costs. However, until 2023 there is no clear amount of assistance costs for growers to process ISPO certification. Rokan Hulu Regency has a Rokan Hulu Independent Smallholder Association which will have ISPO certification in 2021. The research used a survey method with a sample of 32 growers who already had ISPO certification from two villages in Bangun Purba District. The aim of this research is to determine the*

*financing of training, assistance and initial certification in administering ISPO certification by independent oil palm growers. The results of the research show that the training provided to ISPO participating growers was 9 types of training, 18 types of accompanying training, and 10 types of training for organizational administrators/internal auditors. There were 33 assistance provided according to ISPO indicators. The average training cost is IDR 1,717,703 per independent smallholder. The average amount of assistance costs is IDR 2,507,088 per independent smallholder. The average initial certification cost is IDR 535,095 per independent smallholder. The total cost of ISPO certification is IDR 4,759,886 per independent smallholder participating in ISPO.*

### PENDAHULUAN

Peningkatan produktivitas kelapa sawit menuntut untuk menjalankan pertanian berkelanjutan salah satunya adalah pola swadaya yang merupakan pengelolaan kebun yang dilakukan secara mandiri dengan usaha dan dana mulai dari pengadaan sarana hingga penjualan Tandan Buah Segar (TBS). *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* ditetapkan pertama kali pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian menjadi [Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015](#), dan dilanjutkan dengan [Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020](#). Tahun 2019 hanya terdapat 117 perusahaan kelapa sawit yang memiliki sertifikasi ISPO di Provinsi Riau. Jumlah ini hanya sebesar 29,25% dari total 400 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Adapun untuk kelembagaan petani kelapa sawit Riau baru sebanyak 7 kelembagaan ([Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2020](#)). Menurut PERPRES Nomor 44 Tahun 2020, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan dan petani

swadaya di Indonesia harus memiliki sertifikasi ISPO paling lambat 2025.

Jika Sertifikat ISPO diwajibkan Pemerintah maka akan menambah beban finansial para pelaku perkebunan sawit. Pemerintah berperan untuk memperluas sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya membutuhkan dana yang besar, tidak hanya dalam proses sertifikasi, tetapi dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pekebun. [Peraturan Menteri Pertanian No 38 tahun 2020](#) pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Pekebun dapat mengajukan bantuan biaya sertifikasi ISPO, lebih lanjut pada pasal 53 ayat (2) biaya sertifikasi ISPO bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan menteri ini diperkuat dengan [Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020](#) yang mengatur sumber pembiayaan sertifikasi ISPO pada pasal 18 ayat (2). Proses pembiayaan sertifikasi ISPO pada Permentan Nomor 38 tahun 2020 diatur pada pasal 53 ayat

(3) yaitu berupa pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, dan biaya sertifikasi ISPO diawal.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 pasal 18 mengatakan bahwa bantuan pendanaan untuk sertifikasi ISPO dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah untuk biaya sertifikasi ISPO yang disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun atau koperasi. Amanah yang tercantum didalam PERPRES ini belum terealisasi karena belum adanya sumber rujukan biaya sertifikasi ISPO yang dibantu oleh pemerintah. Pembiayaan sertifikasi ISPO telah tertuang dalam program sarana prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS), namun belum ada sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya yang mendapatkan pendaan dari BPD-PKS sehingga tidak diketahui berapa besaran dana bantuan yang disalurkan oleh BPD-PKS. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau. Sektor perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Provinsi Riau (Mifta *et al*, 2023). Di tahun 2022 luas areal kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu mencapai 270.886 hektar dengan tingkat produksi buah kelapa sawit sebesar 695.965 ton tiap tahun (BPS Provinsi Riau, 2023).

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu memiliki suatu perkumpulan/asosiasi yang bernama Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu (PPSKS-RH) Riau. PPSKS-RH telah

memiliki 296 orang pekebun yang telah tersertifikasi ISPO pada tahun 2021. Hingga tahun 2023 biaya dalam mengurus sertifikasi ISPO belum diketahui secara jelas maka permasalahan yang perlu dijawab adalah seperti apa bentuk-bentuk pelatihan dan pendampingan pekebun dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO, dan jumlah besaran biaya pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi awal bagi pekebun kelapa sawit swadaya. Tujuan dari penelitian ini antara lain, (1) mengidentifikasi bentuk pelatihan dan pendampingan yang diterima oleh pekebun dalam mengurus sertifikasi ISPO dan (2) menganalisis berapa besaran biaya pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi awal di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan biaya untuk mengurus sertifikasi ISPO.

## METODE

Penelitian menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode yang sengaja digunakan dalam mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan (Mutu Indonesia, 2022). Survei dilakukan kepada pekebun kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Perkumpulan Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Rokan Hulu (PPSKS-RH) dengan jumlah pekebun sebanyak 1074 anggota namun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO hanya 296 pekebun. Sampel yang diambil berjumlah 32 orang yang terdiri dari: 30 orang sebagai pekebun, 1 orang pendamping, dan 1 orang auditor. Besarnya sampel yang diambil berdasarkan pada pertimbangan studi yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif,

disamping kebutuhan analisis penelitian mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keseragaman karakteristik dari pekebun kelapa sawit di wilayah penelitian (Hadi, 2023).

Analisis besaran biaya untuk pelatihan pekebun dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO dianalisis secara deskriptif. Seluruh biaya yang diberikan kepada pengurus Perkumpulan dalam rangka persiapan sertifikasi ISPO sebagaimana yang telah diinventarisir dan dihitung biayanya lalu dibagi dengan jumlah pekebun yang akan disertifikasi ISPO sehingga diperoleh biaya rata-rata pelatihan per pekebun yang disertifikasi ISPO.

Analisis besaran biaya pendampingan untuk pemenuhan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan Permentan Nomor 38 tahun 2020. Seluruh biaya selama pendampingan untuk pemenuhan standar ISPO yang meliputi upah pendamping, biaya perorangan pekebun dan biaya asosiasi/perkumpulan untuk pemenuhan verifier ISPO dihitung sebagai biaya. Jumlah biaya pendampingan pemenuhan standar ISPO dibagi dengan jumlah pekebun yang akan disertifikasi ISPO merupakan rata-rata biaya pendampingan per pekebun dalam pemenuhan standard ISPO.

Analisis besaran biaya sertifikasi awal merupakan biaya pemeriksaan (*Audit eksternal*) dari lembaga sertifikasi sebelum dikeluarkan sertifikasi ISPO. Biaya sertifikasi awal adalah seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terkait sertifikasi awal. Jumlah biaya sertifikasi awal dibagi dengan jumlah pekebun yang disertifikasi merupakan rata-rata biaya sertifikasi awal per pekebun.

Hasil penjumlahan rata-rata biaya pelatihan, rata-rata biaya pendampingan, dan rata-rata biaya sertifikasi awal merupakan biaya sertifikasi ISPO. Biaya rata-rata hasil perhitungan penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pemerintah dalam membantu pendanaan sertifikasi ISPO untuk perkebunan kelapa sawit rakyat khususnya perkebunan kelapa sawit swadaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Responden

Profil responden merupakan deskripsi tentang karakter dari responden yang akan diteliti. Responden yang diambil merupakan pekebun kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Perkumpulan Pekebun Kelapa Sawit Swadaya Rokan Hulu dan telah memiliki sertifikasi ISPO yang berjumlah 30 jiwa, pendamping berjumlah 1 jiwa, dan *Internal Control System* (ICS) berjumlah 1 jiwa. Profil responden ini terdiri dari: umur, mata pencaharian, pengalaman berkebun, tingkat pendidikan, dan luas lahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi umumnya dimiliki oleh kelompok umur yang masih produktif dibandingkan dengan umur tua yang memiliki fisik terbatas (Aprilyanti, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik usia dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: (1) kelompok usia muda/usia belum produktif (0–14 tahun), (2) usia dewasa/usia kerja/usia produktif (15–54 tahun), dan (3) usia tua/usia tidak produktif (> 55 tahun). Umur responden pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu tergolong pada usia yang produktif. Jumlah

terbanyak berada pada usia 15-64 tahun dengan jumlah sebanyak 31 jiwa dengan persentase sebesar 97%. Maka dapat diketahui bahwa responden pekebun rata-rata tergolong usia produktif, kondisi ini tentunya menggambarkan kemampuan fisik dan pola pikir pekebun masih sangat baik.

Mata pencarian pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi responden pada umumnya adalah pekebun kelapa sawit dengan jumlah responden sebanyak 29 jiwa dengan persentase 97% dan responden sisanya bekerja sebagai buruh sebanyak 1 jiwa dengan jumlah persentase 3%. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Pengalaman berkebun diukur dari lamanya pekebun melakukan usaha perkebunan kelapa sawit. Pengalaman yang lebih banyak dimiliki oleh pekebun yang telah lama berkebun. Pengalaman usahatani dapat dibedakan dalam beberapa kategori (1) baru yaitu kurang dari 10 tahun, (2) sedang yaitu berkisar antara 10 – 20 tahun dan (3) lama yaitu pengalaman lebih dari 20 tahun ([Manyamsari & Mujiburrahmad, 2014](#)). Pekebun pada penelitian ini memiliki pengalaman berusaha tani kelapa sawit 16-20 tahun sebanyak 11 jiwa dengan persentase sebesar 37% dan >20 tahun sebanyak 9 jiwa dengan persentase 30%. Besarnya persentase mengindikasikan bahwa pekebun memiliki lebih banyak pengalaman dalam perkebunan kelapa sawit. Pekebun yang menjadi responden memiliki pengalaman yang lama dalam berkebun, hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten

Rokan Hulu umumnya bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Pekebun memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik dengan jumlah tingkat pendidikan tertinggi yaitu tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 13 jiwa dengan persentase sebesar 41%. Tingkat pendidikan pekebun pada penelitian ini tergolong memadai sebagai pekebun sawit, dimana jenjang pendidikan responden dominan pada level tamat SMA. Tingkat pendidikan yang cukup baik ini tentunya akan memudahkan dalam membimbing pekebun. Pendamping dan ICS memiliki tingkat pendidikan yang sama yaitu tamat Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan pendamping dan ICS yang baik dapat mempermudah dalam membimbing para pekebun.

Luas lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas lahan kebun kelapa sawit yang telah bersertifikat ISPO. Menurut [Hernanto \(2020\)](#) luas kepemilikan lahan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lahan yang terkategori sempit dengan luas  $\leq 0,5$  hektar, lahan yang terkategori sedang, dengan luas antara 0,6 sampai dengan 2 hektar, dan luas lahan yang terkategori luas dengan luas  $> 2$  hektar. Luas lahan responden paling banyak terdapat pada luas lahan 0,6 -2 hektar dengan kategori sedang sebanyak 29 jiwa dengan persentase 97%. Lahan yang dimiliki pekebun merupakan lahan pembagian sejak masa transmigrasi 1985. Pekebun juga ada membeli lahan yang sudah ditanami kelapa sawit. Jenis tanah pada lahan responden seluruhnya merupakan tanah mineral.

**Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO Oleh Pekebun Kelapa Sawit Swadaya**

Pelatihan merupakan proses dalam mengejar keterampilan yang dibutuhkan pekebun dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana pelatihan karyawan memberikan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam dunia kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi perusahaan (Dessler, 2020; Dewi & sadjat, 2024). Pelatihan dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO ada tiga target atau sasaran yang harus dilatih, terdiri dari: pekebun, pendamping, dan *Internal Control System* (ICS) (Novianto *et al.*, 2021). Semua pelatihan tersebut dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekebun telah mendapatkan pelatihan sebelum mendapatkan sertifikasi ISPO di PPSKS-RH. Teknis pelatihan dilakukan oleh pendamping perkumpulan di delapan desa yaitu: (1) Desa Pasir Utama, (2) Desa Rambah Muda, (3) Desa Pasir Agung, (4) Desa Pasir Intan, (5) Desa Pasir Jaya, (6) Desa Rambah Jaya, (7) Desa Batas, (8) Desa Siang Rindang. Pelatihan yang diterima pekebun terdiri dari sembilan pelatihan yang dilaksanakan dimasing-masing desa dengan seluruh pekebun yang mendapatkan sertifikasi ISPO sebanyak 296 pekebun. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pekebun peserta ISPO sebanyak 9 jenis pelatihan yang meliputi: Pelatihan BMP/GAP: Pemupukan, BMP/GAP: Pemeliharaan dan perawatan kebun, BMP/GAP: Pengendalian Hama Terpadu, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), 8 langkah penggunaan pestisida yang aman, NKT (Nilai konservasi Tinggi), SKT (Stok Karbon Tinggi), Pengelolaan Lingkungan, GPS dan GIS. Satu jenis pelatihan memerlukan waktu selama 4 jam.

Pelatihan pendamping merupakan pelatihan untuk pihak-pihak yang melakukan fasilitasi berupa pendampingan dalam rangka sertifikasi ISPO. Pemberdayaan pekebun kelapa sawit swadaya oleh PT Musim Mas dan IFC dimulai tahun 2016 dengan merekrut dan melatih sebanyak 15 orang pendamping. Berdasarkan data dilapangan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebanyak 18 jenis pelatihan yang meliputi: BMP Pemupukan, BMP Pemeliharaan dan Perawatan Kebun, BMP Pengendalian Hama (THPT), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), 8 Langkah Penggunaan Pestisida Yang Aman, Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Stok Karbon Tinggi (SKT), Pengelolaan Lingkungan, Pemetaan, Tenaga Kerja, ISPO dan RSPO, Dinamika Kelompok, Finansial Literasi, Penanggulangan Kebakaran, Permasalahan Sosial dan Gender, Pengelolaan Areal Sungai, Pengelolaan Limbah B3, Perlunya Adanya Kesepakatan Dengan Masyarakat.

Pengurus perkumpulan sesuai dengan struktur organisasi pekebun di Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Swadaya Rokan Hulu (PPSKS-RH) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang diikuti 3 bidang yaitu bidang teknis, dokumen dan data dan audit internal. Pengurus inti pekebun didampingi oleh badan pengawas yang berasal dari PT. Musim Mas (2 orang) dan IFC (1 orang). Ketua perkumpulan bertugas dalam memastikan bahwa seluruh anggota memiliki dokumentasi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar ISPO dan menerapkan standar ISPO. Agar ketua perkumpulan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka Ketua perkumpulan (Ihksan Gunawan, SP, M.MA) dikirim untuk mengikuti



pelatihan auditor ISPO yang dilaksanakan oleh Kompasia selama 10 hari di Medan. Tim ICS merupakan pihak-pihak yang bertugas sebagai pengawas dan pengontrol jalannya penerapan ISPO di setiap pekebun. Tim ICS harus dapat memahami prinsip, kriteria, dan indikator ISPO yang didapatkan melalui pelatihan. *Internal Control System* (ICS) bertugas dalam mempersiapkan pengurus dan pekebun dalam menghadapi audit sertifikasi ISPO yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi serta bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan mengatur *Standard Operating Procedures* (SOP) bagi perkumpulan (Hidayat *et al.*, 2015).

Pelatihan auditor internal/ICS bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat mengelola program audit internal dalam melakukan kegiatan audit internal (Mutu Internasional, 2023). Perkumpulan pekebun swadaya kelapa sawit Rokan Hulu memiliki tim sistem kendali internal yang terdiri dari para pengurus perkumpulan yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan tim desa (audit internal, kontrol teknis, dan dokumen) dengan jumlah 31 orang. Ketua dan 30 orang pengurus lainnya mendapatkan pelatihan sebagai ICS, yang diselenggarakan oleh PT. Musim Mas. Materi pelatihan ICS terdiri dari: (1) *Job Description*, (2) *Dinamika Kelompok*, (3) *Team Work*, (4) *Softskill*, (5) *Penyusunan Rencana Kerja*, (6) *Pelatihan orang desawa*, (7) *Finansial*, (8) *RSPO dan ISPO*, dan (9) *BMP (Best Management Practices)*.

Pendampingan pekebun kelapa sawit swadaya pada tahap awal adalah identifikasi kelembagaan pekebun. Pekebun swadaya

umumnya tidak memiliki kelembagaan, berdasarkan kondisi dilapangan sampai tahun 2023 pekebun swadaya mendapatkan pendampingan dari perusahaan mitra, sehingga jika pemerintah ingin memberikan pendampingan kepada pekebun swadaya dapat dibentuk tim ISPO di setiap Kabupaten. Novianto *et al.* (2021) memberikan solusi untuk mulai mendampingi pekebun dapat dilakukan dengan alur pendampingan sebagai berikut: (1) identifikasi kelembagaan pekebun, (2) membangun komitmen sertifikasi, (3) fasilitasi pendirian organisasi pekebun, (d) fasilitasi pembentukan tim ICS, (4) fasilitasi pelatihan ISPO bagi Tim ICS, (5) fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan system evaluasi kinerja, (6) fasilitasi penataan dokumen dan penyusunan SOP bagi anggota kelompok, dan (7) fasilitasi evaluasi kinerja kelembagaan. Hasil pendampingan terlihat dari pekebun-pekebun telah tergabung kedalam perkumpulan yang diikuti dengan terpenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Pendampingan yang diberikan berupa memfasilitasi pekebun dalam pemenuhan 33 indikator ISPO.

### **Pembiayaan Sertifikasi ISPO di Kabupaten Rokan Hulu**

Biaya pelatihan untuk pekebun dalam memenuhi prinsip dan kriteria ISPO di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan dalam satu kali pelatihan menghabiskan biaya Rp 10.000,- per peserta. Biaya yang dikeluarkan pada pelatihan pekebun umumnya hanya berupa biaya untuk snack dan minum. Perhitungan satu jenis pelatihan yang diterima pekebun adalah sebesar Rp 2.960.000,- yang diperoleh dari 296 pekebun

dikali Rp 10.000,- per peserta. Pelatihan pekebun telah dilakukan sebanyak 9 kali dimulai dari tahun 2017-2021, maka total biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan pekebun adalah sebesar Rp 26.640.000,-.

Biaya pelatihan untuk pendamping dalam memenuhi prinsip dan kriteria ISPO dibagi menjadi 3 paket dan 18 jenis pelatihan. Paket pertama yaitu pelatihan *Best Manajemen Practices* (BMP). Pelatihan paket ini berdasarkan informasi di lapangan dilakukan selama 3 hari dengan biaya sebesar Rp 80.000.000,- untuk 15 orang pendamping. Biaya tersebut diestimasi sesuai dengan jumlah total pelatih dan peserta pada paket ini. Pelatihan pendamping paket kedua berlokasi di Pekanbaru. Pelatihan pada paket ini terdiri dari 6 jenis pelatihan selama 4 hari. Total biaya untuk paket kedua berdasarkan data di lapangan yang diestimasi dari total biaya peserta dan pelatih adalah sebesar Rp 75.000.000,- untuk 15 orang pendamping. Pelatihan paket ketiga diadakan di kantor perkumpulan pekebun swadaya kelapa sawit Rokan Hulu. Pelatihan pada paket ini terdiri dari 9 jenis pelatihan selama 4 hari. Biaya pelatihan paket ini berdasarkan informasi di lapangan diestimasi sebesar Rp 105.000.000,- untuk 15 orang pendamping. Maka jumlah total keseluruhan biaya pelatihan pendamping adalah sebesar Rp 260.000.000,-.

Biaya pelatihan *Internal Control System* (ICS) dalam memenuhi prinsip dan kriteria ISPO terdiri dari: Biaya pelatihan pelatihan training ISPO dan biaya *Internal Control System* (ICS). Pelatihan training ISPO hanya diikuti satu kali yang diwakili oleh ketua perkumpulan di Medan dan berdasarkan informasi yang didapat

dilapangan biaya pelatihan selama 10 hari termasuk hotel dan konsumsi adalah sebesar Rp 17.000.000,-. Biaya tiket pesawat Pekanbaru-Medan pulang pergi sebesar Rp 3.200.000,- per orang. Uang harian sebesar Rp 1.100.000,- (*fullboard meeting*) selama 10 hari dan biaya akomodasi sebesar Rp 500.000,-. Total biaya pelatihan training ISPO oleh ketua perkumpulan diestimasi sebesar Rp 21.800.000,-. Pelatihan ICS dari tahun 2017-2021 diselenggarakan oleh PT Musim Mas dan IFC dilakukan sebanyak dua kali. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan total biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali pelatihan adalah sebesar Rp 100.000.000,-. Maka anggaran yang dikeluarkan dalam dua kali pelatihan adalah sebesar Rp 200.000.000,-. Total estimasi biaya pelatihan *Internal Control System* (ICS) Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu adalah sebesar Rp 221.800.000,-. Total biaya pelatihan per pekebun secara keseluruhan adalah sebesar Rp 508.440.000,- dibagi dengan 296 pekebun maka masing-masing pekebun memerlukan biaya sebesar Rp 1.717.703,-.

Biaya pendampingan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan selama kegiatan pendampingan berlangsung sampai pekebun mendapatkan sertifikasi ISPO. Pendampingan dalam mengurus sertifikasi ISPO yang diberikan Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu (PPSKS-RH) merujuk kepada pemenuhan 33 indikator ISPO untuk pengajuan sertifikasi. Biaya pendampingan akan berubah-ubah tiap tahunnya karena menyesuaikan kondisi di lapangan. Pendampingan pekebun memerlukan biaya diantaranya: Gaji pendamping selama periode 2017 – 2021, pengurusan Surat



Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDB), pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sarana pengendali organisme pengganggu tanaman, biaya alat kebutuhan pekebun, gaji pendamping, biaya kontrak ruko, biaya pembuatan gudang limbah B3, biaya alat pemadam api, dan biaya operasional lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan, gaji pendamping pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.000.000,- per bulan, tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.500.000,- per bulan, tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.800.000,- per bulan, tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.200.000,- per bulan, tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.500.000,- per bulan, biaya pengurusan Surat Tanda Budidaya (STDB) sebesar Rp 58.882.000,- dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebesar Rp 103.300.000,-. Biaya alat kebutuhan pekebun memiliki besaran Rp 236.776.000,-. Biaya kontrak ruko untuk kantor diestimasi sebesar Rp 22.000.000,- per tahun dengan total Rp 110.000.000,-. Biaya membuat gudang limbah B3 di 8 desa sebesar Rp 40.000.000,-. Biaya alat pemadam api Rp 400.000,- tiap desa dengan total Rp 3.200.000,-. Biaya kelembagaan pekebun sebesar Rp 3.500.000,-. Biaya Lahan pekebun yang mengacu tata ruang sebesar Rp 2.000.000,-. Biaya listrik sebesar Rp 30.000.000,-. Biaya ATK dan operasional lainnya diestimasi sebesar Rp 36.000.000,-. Total estimasi biaya pendampingan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 742.098.000,-. dibagi dengan 296 pekebun, maka masing-masing pekebun mengeluarkan biaya Rp 2.507.088,-.

Biaya sertifikasi awal ISPO merupakan biaya pemeriksaan (Audit eksternal) dari lembaga sertifikasi sebelum dikeluarkan sertifikasi ISPO. Audit sertifikasi ISPO Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu dilakukan oleh lembaga sertifikasi *Société Générale de Surveillance* (SGS) Indonesia dengan nomor sertifikat LSISPO-007-IDN. Audit tahap pertama dilakukan selama 2 hari secara online untuk pemeriksaan dokumen melalui zoom meeting sedangkan untuk audit tahap kedua dilakukan selama 4 hari dilapangan untuk *survey* lokasi dengan jumlah 4 orang dan menginap di hotel yang ada di Pasir Pangaraian. Audit sertifikasi ISPO tahap kedua ini mengambil 30 sampel pekebun yang dipilih secara acak oleh auditor. Biaya audit sertifikasi ISPO berasal dari biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung berasal dari biaya asesmen dan biaya di permohonan audit kecukupan, sedangkan biaya tidak langsung berasal dari biaya akomodasi dan transportasi bagi tim audit.

Data yang didapat di lapangan, biaya langsung dalam audit sertifikasi ISPO Perkumpulan Pekebun Swadaya Rokan Hulu berdasarkan lembaga sertifikasi SGS Indonesia, untuk biaya permohonan audit dan kecukupan sebesar Rp 500.000,-, biaya asesmen sebesar Rp 130.000.000,-. Biaya tidak langsung (transportasi, penginapan, uang saku, uang makan, dan transport lokal) diestimasi menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tentang standar biaya masukan tahun anggaran tahun 2021. Besar biaya transportasi pulang pergi didapat sebesar Rp 3.016.000,- yang artinya berjumlah Rp 12.064.000,-. Besar biaya penginapan sebesar Rp 852.000,- orang/malam

untuk pegawai negeri sipil/ pihak lainnya /non yang artinya berjumlah Rp 10.224.000,- untuk 4 auditor dan 3 malam penginapan. Besaran biaya uang saku sebesar Rp 530.000,- orang/hari yang artinya berjumlah Rp 8.480.000,-. Besaran biaya uang makan sebesar Rp 125.000,- orang/hari yang artinya berjumlah Rp 2.000.000,-. Besaran biaya transport lokal ke Kabupaten Rokan Hulu Rp 225.000 orang/hari yang artinya berjumlah Rp 3.600.000,-. Total biaya tidak langsung sebesar Rp 36.368.000,-. Jika dijumlahkan besaran estimasi biaya sertifikasi awal di Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu adalah sebesar Rp 169.868.000,- dibagi dengan jumlah pekebun yang disertifikasi ISPO sebanyak 296 orang, dengan demikian hasil biaya rata-rata sertifikasi awal per pekebun yang disertifikasi ISPO adalah sebesar Rp 535.095,-

Pembiayaan sertifikasi ISPO merupakan total dari biaya pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi awal. Penjumlahan ketiga komponen tersebut dibagi banyaknya pekebun merupakan biaya setiap pekebun dalam mendapatkan sertifikasi ISPO di Perkumpulan Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Rokan Hulu. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya total biaya sertifikasi ISPO di PPSKS-RH adalah Rp 1.408.926.000,- untuk 296 pekebun, maka biaya masing-masing pekebun adalah sebesar Rp 4.759.886,-,

Besaran temuan biaya sertifikasi ISPO PPSKS-RH jika dibandingkan dengan Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak relatif tidak berbeda jauh. Asosiasi memiliki total biaya pelatihan Rp 528.180.000,- pendampingan Rp 919.236.000,- dan biaya sertifikasi awal Rp 160.296.000,- dengan jumlah Rp 1.607.712.000,-

yang memiliki 318 pekebun peserta ISPO sehingga didapat rata-rata Rp 5.055.698,- per pekebun. [Media Perkebunan \(2021\)](#) menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi ISPO diperlukan Rp 4 triliun untuk 1 juta pekebun, yang berarti Rp 4 juta per kebun. Menurut [CNBC Indonesia \(2018\)](#) untuk biaya sertifikasi ISPO diperlukan Rp 1,9 juta hingga Rp 5 juta per hektar. Temuan biaya sertifikasi ISPO dalam penelitian ini sebesar Rp 4,76 juta per pekebun yang dimana biaya tersebut relatif lebih tinggi dari temuan Media Perkebunan dan CNBC. Biaya sertifikasi RSPO di SPKS Tambusai Barat, Rokan Hulu menurut [Info Sawit \(2023\)](#) mengeluarkan biaya sebesar Rp 650.000.000,- untuk 105 pekebun, dengan rata-rata biaya sertifikasi sebesar Rp 6.190.476,- per pekebun. Temuan biaya sertifikasi ISPO dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan SPKS Tambusai Barat relatif lebih murah. Oleh karena itu, apabila diperhatikan perbandingan biaya sertifikasi RSPO dengan sertifikasi ISPO yang telah diteliti tidak jauh berbeda. Pembiayaan sertifikasi ISPO berdasarkan informasi dilapangan lebih banyak dikeluarkan pada pendampingan yang berlangsung cukup lama sehingga perlu lebih diperhatikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO untuk pekebun kelapa sawit swadaya terdiri dari: pelatihan untuk pekebun, pelatihan pendamping, dan pelatihan pengurusan organisasi/*Internal Control System* (ICS). Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pekebun peserta ISPO sebanyak 9 jenis pelatihan, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada

pendamping sebanyak 18 jenis pelatihan, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pengurus organisasi/auditor internal sebanyak 10 jenis pelatihan. Rata-rata besaran biaya pelatihan sebesar Rp 1.717.703,- per pekebun peserta sertifikasi ISPO. Rata-rata besaran biaya pendampingan sebesar Rp 2.507.088,- per pekebun peserta ISPO. Rata-rata biaya sertifikasi awal sebesar Rp 535.095,- per pekebun peserta ISPO. Total biaya sertifikasi ISPO sebesar Rp 4.759.886,- per pekebun peserta ISPO. Pemerintah perlu membentuk Tim ISPO Kabupaten/Kota untuk mendampingi pekebun dalam penguatan kelembagaan karena kelembagaan pekebun swadaya belum ada. Tim ISPO Kabupaten/Kota dan lembaga pelatihan dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pekebun swadaya dalam persiapan sertifikasi ISPO. Pemerintah dapat menyalurkan biaya bantuan sertifikasi ISPO ke BPD-PKS sehingga pembayaran biaya pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi awal untuk pekebun swadaya dapat ditanggung oleh BPD-PKS sedangkan dengan organisasi/kelompok pekebun cukup teknis sertifikasi saja.

#### PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Johannes Guisandro berperan sebagai kontributor utama sekaligus kontributor korespondensi, sementara Sakti Hutabarat dan Syaiful Hadi sebagai kontributor anggota.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aprilyanti, S. (2017). *Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (Studi kasus: PT. Oasis Water International*

*Cabang Palembang). Jurnal Sistem dan Manajemen Industri, 1(2), 68-72.*

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). *Provinsi Riau Dalam Angka 2023*. Pekanbaru.
- CNBC Indonesia. (2018). *70% Lahan Sawit Tak Bersertifikasi, Mungkinkah Wajib ISPO?.* <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024.
- Dewi, R., & Sadjat, R. M. E. M. (2024). Pengembangan Sdm Dalam Industri Konveksi Pembuatan Boneka Untuk Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Bisnis. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, 3(1), 724-732.*
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2020). *Data ISPO Riau. Pekanbaru Direktorat Jendral Perkebunan. 2022. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022.* Pekanbaru.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., & Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian, 21(1), 21-42.*
- Hernanto. (2020). *Ilmu Usahatani*. Penerbit Swadaya, Jakarta.
- Hidayat, K. N., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). *Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. International Food and Agribusiness Management Review, 18(3), 25-48.*
- Info Sawit. (2023). *Biaya Sertifikasi Sawit Berkelanjutan dan Kelembagaan Jadi Ganjalan Petani Sawit.* <https://www.infosawit.com>. Diakses 17 November 2023
- Manyamsari, I., & Mujiburrahmad, M. (2014). *Karakteristik Petani Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus: Di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat). Jurnal Agrisepe, 15(2), 58-74.*
- Media Perkebunan. (2021). *Pekebun Yang Mau Sertifikasi Ispo Harus Punya Stdb.* <https://mediaperkebunan.id>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023

- Menteri Pertanian Republik Indonesia. (2015). *Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO)*. Jakarta.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta.
- Mutu Indonesia. (2022). *Metode Survey Dalam Penelitian*.  
<https://mutucertification.com/memahami-metodesurvey/#:~:text=Metode%20survey%20merupakan%20metode%20yang,untuk%20mendapatkan%20data%20yang%20diperlukan>.
- Mutu International. (2023). *Cara pengajuan sertifikasi ISPO*.
- Novianto, E. Metia, & Lembasi. (2021). *Modul Pendampingan Sertifikasi ISPO Pekebun*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). *Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta.